

URGENSI PENGUASAAN BAHASA INGGRIS BAGI APARATUR DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS ADMINISTRASI PUBLIK

Ratih Arifin¹, Sry Ade Muhtya Gobel², Olgha S. Nusu³

Araarifin89@gmail.com¹, Sryabel.gobel@gmail.com², olghanusu544@gmail.com³

Universitas Bina Taruna Gorontalo

ABSTRAK

Administrasi publik sebagai tulang punggung penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan aparatur sipil negara (ASN) yang memiliki kompetensi sesuai tuntutan global, salah satunya penguasaan bahasa Inggris. Bahasa ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi lintas negara, tetapi juga sebagai instrumen untuk memahami kebijakan internasional, mengakses literatur global, dan mendukung implementasi e-government. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan menelaah regulasi, laporan internasional, serta penelitian terdahulu terkait kompetensi bahasa asing dalam birokrasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa kemampuan bahasa Inggris ASN di Indonesia masih rendah, sehingga menghambat adopsi standar pelayanan publik internasional, memperlambat transformasi digital, dan membatasi peran Indonesia dalam forum global. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya strategi peningkatan kompetensi bahasa Inggris yang terintegrasi dalam reformasi birokrasi, baik melalui regulasi yang tegas, pelatihan berjenjang dan kontekstual, pemanfaatan teknologi digital, maupun penciptaan lingkungan kerja yang mendukung. Dengan peningkatan kompetensi ini, administrasi publik Indonesia dapat lebih efektif, profesional, dan berdaya saing dalam menghadapi tantangan globalisasi.

Kata kunci: *Administrasi Publik, Aparatur Sipil Negara, Kompetensi Bahasa Inggris, Pelayanan Publik, Globalisasi*

ABSTRACT

Public administration, as the backbone of government operations, requires civil servants (ASN) with competencies aligned with global demands, one of which is English proficiency. This language not only serves as a means of cross-country communication but also as an instrument for understanding international policies, accessing global literature, and supporting e-government implementation. This research uses a literature review method by examining regulations, international reports, and previous research related to foreign language competence in bureaucracy. The study results indicate that the English proficiency of Indonesian civil servants is still low, thereby hindering the adoption of international public service standards, slowing down digital transformation, and limiting Indonesia's role in global forums. This condition emphasizes the importance of an integrated strategy for improving English proficiency within bureaucratic reform, through strict regulations, tiered and contextual training, utilization of digital technology, and the creation of a supportive work environment. With this increase in competence, Indonesian public administration can be more effective, professional, and competitive in facing the challenges of globalization.

Keywords: *Public Administration, Civil Servants, English Proficiency, Public Services, Globalization*

LATAR BELAKANG

Administrasi publik merupakan tulang punggung penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, efektivitas kebijakan, serta tata kelola yang transparan. Dalam konteks globalisasi dan integrasi ekonomi dunia, tuntutan terhadap efektivitas administrasi publik tidak hanya terkait dengan aspek regulasi, prosedur, maupun teknologi, tetapi juga kemampuan sumber daya manusia, khususnya penguasaan bahasa asing. Bahasa Inggris, yang diakui secara internasional sebagai *lingua franca* dalam diplomasi, perdagangan, dan pertukaran ilmu pengetahuan, menjadi salah satu kompetensi strategis bagi aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia.

Posisi bahasa Inggris dalam administrasi publik semakin penting seiring meningkatnya keterlibatan Indonesia dalam kerja sama internasional. Melalui forum global seperti G20 dan forum regional seperti ASEAN, aparatur dituntut untuk mampu berkomunikasi secara efektif dengan mitra internasional. Kurangnya kemampuan berbahasa Inggris seringkali menimbulkan hambatan komunikasi dan mengurangi kontribusi Indonesia dalam forum internasional (ASEAN Secretariat, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa keterampilan bahasa Inggris tidak sekadar kebutuhan tambahan, tetapi merupakan kompetensi inti dalam menunjang efektivitas administrasi publik.

Hasil laporan EF English Proficiency Index (EF EPI) 2023 menempatkan Indonesia pada peringkat ke-79 dari 113 negara dengan kategori *low proficiency*. Posisi ini menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dan menjadi indikator adanya persoalan serius terkait keterampilan bahasa Inggris di kalangan masyarakat luas, termasuk aparatur pemerintah (EF EPI, 2023). Keterbatasan kemampuan ini berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik, terutama ketika aparatur harus memahami dokumen kebijakan internasional, standar layanan global, atau ketika melayani pemangku kepentingan asing.

Dalam praktik administrasi publik sehari-hari, banyak dokumen kebijakan, laporan internasional, hingga pedoman reformasi birokrasi yang ditulis dalam bahasa Inggris. Aparatur yang memiliki keterampilan bahasa Inggris terbatas akan kesulitan menerjemahkan, memahami, atau mengimplementasikan standar internasional tersebut. Padahal, adopsi praktik terbaik (*best practices*) dari negara lain sangat diperlukan untuk mempercepat reformasi birokrasi di Indonesia (Dwiyanto & Kusumasari, 2021). Dengan demikian, penguasaan bahasa Inggris oleh aparatur memiliki dampak langsung terhadap kualitas kebijakan publik maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sebagian besar menggunakan literatur, perangkat lunak, dan panduan berbahasa Inggris juga semakin menegaskan pentingnya kemampuan ini. Misalnya, dalam penerapan *e-government*, mayoritas perangkat digital, aplikasi layanan, maupun panduan teknis berasal dari sumber berbahasa Inggris. Aparatur yang tidak memiliki keterampilan memadai akan tertinggal dalam menguasai teknologi baru, sehingga dapat menghambat efektivitas layanan publik

(Pratama & Nugroho, 2022).

Dari sisi kebijakan, pemerintah Indonesia sebenarnya telah menekankan pentingnya penguasaan bahasa asing melalui berbagai regulasi. Misalnya, PermenPAN-RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN menyebutkan bahasa asing sebagai salah satu kompetensi teknis yang harus dimiliki, terutama pada jabatan yang terkait dengan kerja sama internasional. Namun, dalam implementasinya, pelatihan bahasa Inggris bagi aparatur masih sangat terbatas, tidak merata, dan cenderung hanya menysasar pegawai di level tertentu (BKN, 2021).

Lebih jauh lagi, peningkatan penguasaan bahasa Inggris memiliki dampak terhadap diplomasi publik. Dalam era diplomasi modern, tidak hanya diplomat yang perlu menguasai bahasa Inggris, tetapi juga aparatur di daerah yang berinteraksi langsung dengan investor asing, lembaga internasional, maupun wisatawan mancanegara. Dengan demikian, kompetensi bahasa Inggris menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan citra Indonesia sebagai negara yang profesional dan terbuka (Santosa, 2022).

Dari berbagai uraian di atas, dapat dipahami bahwa urgensi penguasaan bahasa Inggris bagi aparatur dalam meningkatkan efektivitas administrasi publik setidaknya didasari oleh tiga alasan utama. Pertama, keterlibatan Indonesia dalam forum global membutuhkan aparatur yang mampu berkomunikasi dengan standar internasional. Kedua, penguasaan bahasa Inggris menjadi prasyarat untuk memahami, mengadopsi, dan mengimplementasikan praktik terbaik dalam reformasi birokrasi. Ketiga, pelayanan publik yang efektif di era digital dan global membutuhkan aparatur yang mampu mengakses informasi, teknologi, dan literatur internasional secara langsung.

Tanpa penguasaan bahasa Inggris yang memadai, Indonesia berisiko tertinggal dalam kompetisi global, pelayanan publik akan terhambat, dan aparatur sulit menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman. Oleh karena itu, penelitian mengenai urgensi penguasaan bahasa Inggris bagi aparatur dalam meningkatkan efektivitas administrasi publik menjadi sangat penting untuk mendukung arah reformasi birokrasi di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*library research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan mengkaji, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik “Urgensi Penguasaan Bahasa Inggris bagi Aparatur dalam Meningkatkan Efektivitas Administrasi Publik”. Metode ini dipilih karena topik penelitian berhubungan erat dengan teori, kebijakan, laporan internasional, serta penelitian terdahulu yang sudah tersedia dalam bentuk publikasi ilmiah.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas literatur primer dan sekunder. Literatur primer meliputi buku teks terkini tentang administrasi publik, komunikasi birokrasi, dan kompetensi bahasa asing, sedangkan literatur sekunder meliputi artikel jurnal, laporan tahunan lembaga pemerintah, regulasi, serta laporan internasional seperti EF English

Proficiency Index (2023) dan dokumen resmi ASEAN Secretariat (2022). Penelusuran data dilakukan dengan mengakses basis data akademik seperti Google Scholar, ResearchGate, dan portal jurnal nasional, serta dokumen resmi dari kementerian/lembaga.

Prosedur penelitian dimulai dengan identifikasi literatur yang relevan, kemudian dilakukan seleksi dengan kriteria: terbit dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2021–2023), memiliki relevansi langsung dengan administrasi publik dan bahasa Inggris, serta dapat diakses secara terbuka. Selanjutnya, literatur yang terpilih dianalisis secara kualitatif melalui proses kategorisasi, sintesis, dan interpretasi. Model analisis yang digunakan merujuk pada tahapan Miles, Huberman, dan Saldaña (2019), yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Keabsahan hasil penelitian dijaga dengan cara melakukan triangulasi literatur, yaitu membandingkan temuan dari berbagai sumber yang berbeda (misalnya antara laporan internasional dengan hasil penelitian akademik di Indonesia). Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya menyajikan gambaran konseptual, tetapi juga memberikan sintesis yang dapat memperkuat pemahaman tentang pentingnya penguasaan bahasa Inggris oleh aparatur dalam meningkatkan efektivitas administrasi publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Kemampuan Bahasa Inggris Aparatur di Indonesia

Bahasa Inggris pada era globalisasi bukan lagi sekadar keterampilan tambahan, melainkan kebutuhan mendasar yang harus dimiliki oleh aparatur sipil negara (ASN). Kemampuan berbahasa Inggris memungkinkan aparatur untuk mengakses informasi global, menjalin komunikasi lintas negara, serta mengadopsi praktik terbaik dari berbagai belahan dunia. Namun, kondisi faktual di Indonesia menunjukkan bahwa kompetensi bahasa Inggris ASN masih tergolong rendah dan belum merata, baik dari segi penguasaan kosakata, keterampilan komunikasi, maupun kemampuan menulis dokumen resmi. Hal ini berimplikasi langsung terhadap efektivitas pelayanan publik serta posisi Indonesia dalam forum internasional.

Laporan terbaru EF English Proficiency Index (EF EPI, 2023) menempatkan Indonesia pada peringkat ke-79 dari 113 negara dengan kategori *low proficiency*. Peringkat ini menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dan jauh di bawah beberapa negara ASEAN seperti Singapura, Filipina, maupun Malaysia yang berhasil masuk kategori *high proficiency*. Kondisi ini menggambarkan bahwa penguasaan bahasa Inggris di Indonesia, termasuk pada kalangan aparatur pemerintah, masih menjadi pekerjaan rumah yang besar. Rendahnya kemampuan ini bukan hanya persoalan individu ASN, tetapi juga mencerminkan kurang optimalnya sistem pengembangan kapasitas aparatur yang ada saat ini.

Keterbatasan bahasa Inggris pada ASN seringkali terlihat dalam interaksi mereka dengan pemangku kepentingan asing. Misalnya, pada sektor pariwisata, investasi, dan

hubungan kerja sama internasional, aparaturnya daerah kerap mengalami kesulitan dalam menjelaskan prosedur, menjawab pertanyaan, maupun memahami kebutuhan mitra asing. Studi yang dilakukan oleh Santosa (2022) menunjukkan bahwa banyak ASN di daerah wisata utama Indonesia masih mengandalkan penerjemah atau staf pendukung untuk berkomunikasi dengan wisatawan mancanegara. Hal ini menimbulkan kesan kurang profesional dan mengurangi kepercayaan publik internasional terhadap kualitas pelayanan birokrasi Indonesia.

Selain itu, rendahnya penguasaan bahasa Inggris juga berdampak pada keterlambatan adopsi kebijakan dan teknologi. Banyak pedoman, standar internasional, dan dokumen kerja sama yang ditulis dalam bahasa Inggris. Aparatur yang tidak mampu memahami dokumen tersebut secara langsung harus bergantung pada terjemahan, yang seringkali membutuhkan waktu lama dan berisiko menimbulkan salah tafsir. Menurut Pratama & Nugroho (2022), hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam transformasi digital layanan publik di Indonesia, karena mayoritas perangkat lunak, panduan, dan literatur pendukung berbasis bahasa Inggris.

Permasalahan lain yang cukup menonjol adalah disparitas kemampuan bahasa Inggris antarinstansi. ASN di kementerian atau lembaga pusat yang sering berhubungan dengan organisasi internasional umumnya memiliki kemampuan bahasa Inggris yang lebih baik karena mendapatkan pelatihan lebih intensif. Sebaliknya, ASN di pemerintah daerah, terutama di wilayah terpencil, sangat jarang mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan bahasa asing. Laporan Badan Kepegawaian Negara (BKN, 2021) menunjukkan bahwa program pelatihan bahasa asing bagi ASN masih terbatas, tidak merata, dan belum menjadi prioritas utama dalam agenda pengembangan kompetensi. Hal ini menyebabkan kesenjangan kualitas ASN di pusat dan daerah semakin lebar.

Dari sisi regulasi, sebenarnya pemerintah telah menempatkan kemampuan bahasa asing sebagai salah satu kompetensi teknis ASN. PermenPAN-RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN menyebutkan bahwa penguasaan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, menjadi salah satu syarat dalam jabatan yang berkaitan dengan hubungan internasional. Namun, implementasi regulasi ini belum sepenuhnya berjalan optimal. Dalam praktiknya, penilaian kompetensi ASN masih lebih banyak berfokus pada aspek administratif dan manajerial, sementara kemampuan bahasa asing seringkali terabaikan.

Dalam konteks global, lemahnya kemampuan bahasa Inggris ASN berpotensi mengurangi kontribusi Indonesia dalam forum internasional. Sebagai contoh, dalam pertemuan-pertemuan ASEAN atau G20, keterbatasan komunikasi menyebabkan aparaturnya Indonesia sulit menegosiasikan kepentingan nasional secara efektif. Padahal, menurut ASEAN Sekretariat (2022), keberhasilan kerja sama regional sangat ditentukan oleh kemampuan delegasi tiap negara untuk berkomunikasi secara jelas, meyakinkan, dan

profesional dalam bahasa Inggris. Kondisi ini dapat membuat Indonesia kehilangan kesempatan untuk memaksimalkan perannya dalam percaturan global.

Meskipun demikian, terdapat juga beberapa perkembangan positif yang perlu diapresiasi. Beberapa kementerian, seperti Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, telah secara rutin memberikan pelatihan bahasa Inggris kepada pegawainya. Bahkan, beberapa pemerintah daerah mulai menyadari pentingnya kemampuan bahasa Inggris, terutama di kawasan yang menjadi destinasi investasi dan wisata internasional. Program *English for Public Servants* yang digagas di beberapa daerah merupakan contoh inisiatif baik yang dapat diperluas ke wilayah lain.

Selain program pelatihan formal, perkembangan teknologi digital sebenarnya juga membuka peluang baru bagi ASN untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris secara mandiri. Platform pembelajaran daring seperti Duolingo, Coursera, atau aplikasi berbasis AI dapat diakses secara gratis atau dengan biaya rendah. Namun, tantangan terbesar terletak pada motivasi dan dukungan institusi. Tanpa dorongan dari pimpinan instansi dan sistem penilaian kinerja yang mengakui kompetensi bahasa, ASN cenderung menganggap kemampuan bahasa Inggris bukan prioritas.

Kondisi rendahnya kemampuan bahasa Inggris ASN juga tidak bisa dilepaskan dari faktor pendidikan. Kurikulum pendidikan formal di Indonesia selama ini memang mengajarkan bahasa Inggris, tetapi penerapannya masih bersifat umum dan tidak spesifik untuk kebutuhan administrasi publik. Padahal, ASN membutuhkan keterampilan khusus, seperti menulis surat resmi dalam bahasa Inggris, menyusun laporan kebijakan, melakukan negosiasi, dan menyampaikan presentasi di forum internasional. Tanpa kurikulum yang kontekstual, pelatihan bahasa Inggris hanya menghasilkan kemampuan dasar yang kurang relevan dengan kebutuhan birokrasi.

Bahasa Inggris memiliki posisi yang sangat penting dalam administrasi publik modern. Dalam era globalisasi, birokrasi tidak hanya berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan bagi masyarakat domestik, tetapi juga harus mampu berinteraksi dengan dunia internasional. Bahasa Inggris yang sudah diakui sebagai *lingua franca* global menjadi kunci untuk memperkuat komunikasi lintas batas, terutama dalam forum internasional seperti ASEAN, APEC, atau G20. Aparatur sipil negara (ASN) yang tidak menguasai bahasa Inggris berpotensi menghadapi hambatan dalam menyampaikan aspirasi dan kepentingan nasional, sehingga posisi Indonesia dalam perundingan global menjadi kurang optimal.

Selain sebagai sarana komunikasi, bahasa Inggris juga berperan sebagai alat untuk mengakses pengetahuan dan kebijakan internasional. Sebagian besar dokumen standar pelayanan publik, laporan penelitian, maupun pedoman dari lembaga internasional ditulis dalam bahasa Inggris. Tanpa kemampuan yang memadai, aparatur akan kesulitan memahami dan mengadopsi praktik terbaik dari negara lain. Hal ini berimplikasi pada

lambatnya reformasi birokrasi serta keterbatasan Indonesia dalam mengimplementasikan kebijakan berbasis bukti global. Dengan demikian, penguasaan bahasa Inggris sesungguhnya bukan sekadar keterampilan tambahan, melainkan modal utama bagi ASN agar lebih responsif terhadap perkembangan dunia.

Urgensi penguasaan bahasa Inggris juga semakin nyata seiring transformasi digital yang sedang dijalankan pemerintah. Hampir seluruh perangkat lunak, aplikasi, maupun instruksi teknis administrasi publik berbasis bahasa Inggris. Aparatur yang tidak memahami istilah teknis dalam bahasa asing tersebut cenderung mengalami hambatan dalam mengoperasikan sistem, sehingga mengurangi efektivitas pelayanan digital. Kondisi ini membuat kemampuan bahasa Inggris berkaitan langsung dengan keberhasilan implementasi *e-government* yang menjadi prioritas reformasi birokrasi Indonesia.

Tidak hanya dalam konteks internasional, penguasaan bahasa Inggris juga berpengaruh pada pelayanan publik di dalam negeri. Jumlah wisatawan, investor, dan pekerja asing di Indonesia terus meningkat, sehingga tuntutan pelayanan publik yang ramah dan inklusif menjadi semakin tinggi. Aparatur yang mampu berkomunikasi dengan bahasa Inggris dapat memberikan pelayanan yang lebih profesional, memperkuat citra birokrasi, dan meningkatkan daya saing daerah. Sebaliknya, keterbatasan komunikasi akan menimbulkan kesan kurang siap dan berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat internasional terhadap pemerintah Indonesia.

Dari perspektif reformasi birokrasi, bahasa Inggris juga dapat dipandang sebagai indikator profesionalisme. ASN yang memiliki kemampuan berbahasa asing lebih siap untuk ditempatkan pada posisi strategis, baik di pusat maupun daerah. Sayangnya, hingga kini pelatihan bahasa Inggris masih terbatas, tidak merata, dan cenderung bersifat formalitas. Ketidadaan sistem penghargaan bagi ASN yang memiliki kompetensi bahasa asing semakin memperlemah motivasi individu untuk meningkatkan kemampuannya. Padahal, bahasa Inggris bukan lagi sekadar keterampilan opsional, melainkan kebutuhan mendesak yang menentukan kualitas birokrasi ke depan.

Dengan memperhatikan berbagai aspek tersebut, jelas bahwa urgensi bahasa Inggris dalam administrasi publik tidak dapat diabaikan. Bahasa ini bukan hanya sarana komunikasi, tetapi juga pintu masuk menuju pengetahuan global, inovasi teknologi, pelayanan publik yang inklusif, serta representasi kepentingan nasional di kancah internasional. Jika kemampuan bahasa Inggris ASN dapat ditingkatkan secara serius, maka efektivitas administrasi publik di Indonesia akan mengalami kemajuan signifikan, sekaligus memperkuat posisi bangsa dalam kompetisi global yang semakin ketat.

2. Strategi Peningkatan Kompetensi Bahasa Inggris Aparatur

Kemampuan bahasa Inggris bagi aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia semakin menjadi kebutuhan strategis yang tidak dapat ditunda. Tuntutan globalisasi, keterbukaan informasi, dan peningkatan interaksi internasional membuat aparatur dituntut mampu

berkomunikasi dengan berbagai pihak lintas negara serta memahami dokumen-dokumen kebijakan yang mayoritas ditulis dalam bahasa Inggris. Namun, realitas menunjukkan bahwa kompetensi bahasa Inggris ASN masih terbatas, baik dari segi komunikasi lisan maupun keterampilan menulis dan membaca. Kondisi ini tentu menjadi hambatan dalam penyelenggaraan administrasi publik yang efektif dan adaptif. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang menyeluruh dan berkelanjutan agar kemampuan bahasa Inggris ASN dapat meningkat secara signifikan dan terukur.

Salah satu strategi mendasar adalah integrasi bahasa Inggris dalam kebijakan dan regulasi ASN. Bahasa Inggris perlu ditempatkan sebagai kompetensi inti, bukan sekadar keterampilan tambahan. Regulasi yang mengikat, misalnya dengan merevisi standar kompetensi jabatan ASN, dapat menjadikan penguasaan bahasa Inggris sebagai salah satu indikator utama dalam promosi jabatan maupun seleksi calon aparatur baru. Dengan langkah ini, bahasa Inggris akan dipandang serius oleh ASN, karena terkait langsung dengan pengembangan karier dan penilaian kinerja. Bahkan, pemerintah dapat menetapkan standar skor tertentu pada tes internasional, seperti TOEFL atau IELTS, sebagai syarat menduduki posisi strategis yang berhubungan dengan hubungan luar negeri, investasi, atau pelayanan publik internasional.

Selain kebijakan yang tegas, program pelatihan bahasa Inggris berjenjang dan berkelanjutan juga sangat diperlukan. Selama ini, pelatihan bahasa Inggris untuk ASN cenderung bersifat formalitas, berlangsung singkat, dan jarang disertai evaluasi hasil belajar. Padahal, penguasaan bahasa asing membutuhkan proses jangka panjang dengan metode yang tepat. Program pelatihan sebaiknya dirancang sesuai dengan tingkat kemampuan ASN, mulai dari pemula hingga mahir, serta menggunakan pendekatan yang kontekstual. Artinya, materi pelatihan harus relevan dengan kebutuhan administrasi publik, misalnya keterampilan menulis surat resmi, menyusun laporan kebijakan, menyampaikan presentasi, atau melakukan negosiasi dalam bahasa Inggris. Dengan metode ini, pelatihan tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga memberikan keterampilan praktis yang bisa langsung diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari.

Pemanfaatan teknologi digital juga membuka peluang besar untuk mempercepat peningkatan kompetensi bahasa Inggris ASN. Saat ini tersedia berbagai platform pembelajaran daring yang fleksibel dan mudah diakses, seperti Duolingo, Coursera, atau aplikasi berbasis kecerdasan buatan. Melalui platform ini, ASN dapat belajar kapan saja dan di mana saja sesuai dengan waktu yang dimiliki, tanpa harus meninggalkan pekerjaan utama. Lebih jauh, pemerintah dapat mengembangkan aplikasi internal khusus bagi ASN yang berisi modul pembelajaran bahasa Inggris berbasis kebutuhan birokrasi. Misalnya, simulasi percakapan pelayanan publik, penyusunan dokumen resmi, atau latihan presentasi. Jika dilengkapi dengan sistem gamifikasi, pembelajaran akan terasa lebih menarik dan mampu memotivasi ASN untuk terus meningkatkan keterampilan bahasa

mereka.

Kerja sama dengan lembaga pendidikan juga menjadi strategi penting. Pemerintah dapat menjalin kemitraan dengan universitas, lembaga kursus bahasa, maupun organisasi internasional untuk merancang program pelatihan bahasa Inggris yang lebih efektif. Lembaga pendidikan tinggi yang memiliki program studi bahasa Inggris, misalnya, dapat dilibatkan dalam menyusun kurikulum pelatihan yang sesuai dengan konteks administrasi publik. Selain itu, melalui kerja sama dengan mitra internasional, ASN berkesempatan mengikuti kursus intensif, program pertukaran, atau pelatihan singkat di luar negeri yang akan memperkaya pengalaman dan mempercepat proses penguasaan bahasa. Strategi ini tidak hanya meningkatkan keterampilan bahasa, tetapi juga memperluas wawasan ASN tentang praktik tata kelola pemerintahan global.

Lingkungan kerja yang mendukung juga tidak kalah penting dalam strategi peningkatan kompetensi bahasa Inggris. Pelatihan formal tidak akan optimal jika tidak diikuti dengan praktik berkelanjutan di tempat kerja. Oleh karena itu, instansi pemerintah perlu menciptakan budaya penggunaan bahasa Inggris dalam kegiatan tertentu. Contohnya, rapat mingguan atau bulanan bisa sesekali dilakukan dalam bahasa Inggris, laporan singkat dapat dibuat dalam versi bilingual, atau komunikasi internal tertentu bisa diarahkan menggunakan bahasa asing. Ketika lingkungan kerja terbiasa dengan penggunaan bahasa Inggris, ASN akan lebih percaya diri untuk menggunakannya secara aktif, sehingga keterampilan yang diperoleh dari pelatihan dapat terasah dengan baik.

Untuk memperkuat motivasi, strategi selanjutnya adalah menyediakan sistem insentif dan penghargaan bagi ASN yang berhasil meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Insentif ini bisa berupa tunjangan tambahan, kesempatan promosi, prioritas dalam penugasan internasional, atau peluang mengikuti pelatihan ke luar negeri. Dengan adanya penghargaan nyata, ASN akan merasa bahwa usaha mereka dalam belajar bahasa Inggris dihargai dan berdampak pada perkembangan karier. Insentif ini juga dapat diintegrasikan dalam sistem penilaian kinerja, sehingga penguasaan bahasa Inggris menjadi salah satu faktor yang memengaruhi penilaian prestasi kerja ASN.

Namun, semua strategi tersebut tidak akan berjalan efektif tanpa adanya monitoring dan evaluasi yang konsisten. Pemerintah perlu memastikan bahwa pelatihan bahasa Inggris benar-benar menghasilkan dampak nyata bagi peningkatan kompetensi ASN. Evaluasi bisa dilakukan melalui tes kemampuan berkala, penilaian kinerja berbasis bahasa asing, atau survei kepuasan pemangku kepentingan internasional terhadap pelayanan publik. Jika ditemukan kendala, kurikulum pelatihan dan metode pembelajaran perlu segera diperbaiki agar lebih relevan dan efektif. Dengan sistem monitoring yang baik, strategi peningkatan kompetensi bahasa Inggris dapat terus disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan birokrasi dan tantangan global.

Secara keseluruhan, strategi peningkatan kompetensi bahasa Inggris ASN harus

bersifat komprehensif, mulai dari integrasi dalam regulasi, penguatan program pelatihan, pemanfaatan teknologi digital, kerja sama dengan lembaga pendidikan, penciptaan lingkungan kerja yang mendukung, pemberian insentif, hingga monitoring yang berkelanjutan. Semua elemen tersebut saling melengkapi dan tidak bisa dijalankan secara parsial. Penguasaan bahasa Inggris tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga menjadi modal strategis untuk meningkatkan efektivitas administrasi publik, memperkuat citra birokrasi, dan memperluas peran Indonesia dalam percaturan global.

Jika strategi-strategi ini dapat diterapkan secara konsisten, maka aparatur sipil negara Indonesia akan memiliki kompetensi bahasa Inggris yang lebih baik, siap menghadapi tantangan global, dan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih profesional serta inklusif. Peningkatan ini tidak hanya akan memperkuat daya saing individu ASN, tetapi juga meningkatkan kualitas birokrasi secara keseluruhan, sehingga Indonesia mampu bersaing dengan negara lain dalam mewujudkan pemerintahan yang modern, efektif, dan berdaya saing tinggi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa penguasaan bahasa Inggris oleh aparatur sipil negara di Indonesia merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Kompetensi bahasa asing ini terbukti berperan penting dalam meningkatkan efektivitas administrasi publik, baik dalam konteks komunikasi global, akses terhadap pengetahuan internasional, penerapan teknologi digital, maupun penyediaan layanan publik yang inklusif. Namun, kondisi faktual menunjukkan bahwa kemampuan bahasa Inggris ASN masih tergolong rendah dan belum merata, terutama antara aparatur pusat dan daerah. Keterbatasan ini berimplikasi pada rendahnya kualitas komunikasi dengan mitra asing, lambatnya adopsi kebijakan global, serta kurang optimalnya implementasi *e-government* yang sebagian besar berbasis bahasa Inggris. Jika tidak segera diatasi, kondisi ini dapat membuat Indonesia tertinggal dalam kompetisi global serta melemahkan daya saing birokrasi.

Untuk itu, diperlukan strategi peningkatan kompetensi bahasa Inggris ASN yang bersifat menyeluruh dan berkelanjutan. Pemerintah pusat perlu menegaskan regulasi yang menjadikan bahasa Inggris sebagai kompetensi inti ASN, terutama pada jabatan strategis yang berkaitan dengan hubungan internasional dan investasi. Pemerintah daerah juga dituntut lebih proaktif menyelenggarakan pelatihan bahasa asing, khususnya di wilayah yang berhubungan langsung dengan wisatawan maupun investor mancanegara. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan mitra internasional menjadi penting untuk merancang program pelatihan yang relevan dengan kebutuhan birokrasi, sementara teknologi digital dapat dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran fleksibel yang dapat diakses secara mandiri oleh ASN.

Keberhasilan strategi peningkatan kompetensi bahasa Inggris juga bergantung pada

dukungan lingkungan kerja yang kondusif serta adanya sistem penghargaan yang jelas. Aparatur yang memiliki kemampuan bahasa Inggris perlu diberikan insentif, kesempatan promosi, maupun peluang mengikuti penugasan internasional sebagai bentuk apresiasi. Di sisi lain, ASN sendiri dituntut memiliki kesadaran dan motivasi untuk terus mengasah kemampuan bahasa melalui berbagai platform pembelajaran daring dan komunitas profesional.

Secara keseluruhan, peningkatan kompetensi bahasa Inggris ASN tidak dapat dipandang hanya sebagai keterampilan tambahan, melainkan sebagai bagian integral dari upaya reformasi birokrasi. Dengan penguasaan bahasa Inggris yang lebih baik, aparatur Indonesia akan mampu menjalankan administrasi publik secara lebih efektif, memperkuat citra profesional birokrasi, serta menempatkan Indonesia pada posisi yang lebih strategis dalam percaturan global. Penelitian di masa depan dapat memperdalam temuan ini dengan melibatkan data empiris melalui survei maupun wawancara langsung terhadap ASN, sehingga strategi yang dihasilkan semakin sesuai dengan kebutuhan nyata birokrasi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiah, N., & Wulandari, R. (2021). The importance of English proficiency for public servants in the globalization era. *Journal of Public Administration Studies*, 5(2), 112–123. <https://doi.org/10.22219/jpas.v5i2.112>
- Astuti, P. D., & Rahman, F. (2022). Language competency and its impact on bureaucratic performance in Indonesia. *International Journal of Social and Administrative Sciences*, 7(1), 45–58. <https://doi.org/10.18488/journal.136.2022.71.45.58>
- Budiman, H., & Yuliana, D. (2023). Enhancing civil servants' English skills through digital learning platforms. *Journal of e-Government Studies*, 11(1), 88–102. <https://doi.org/10.31002/jegs.v11i1.229>
- Fitriani, A., & Nugroho, T. (2022). English as a global competence for Indonesian bureaucrats: Challenges and strategies. *Journal of Government and Civil Service*, 6(2), 155–169. <https://doi.org/10.35912/jgcs.v6i2.148>
- Kurniawan, D., & Santosa, H. (2023). Digital transformation and the role of English proficiency among Indonesian civil servants. *Public Policy and Governance Review*, 12(1), 76–89. <https://doi.org/10.36412/ppgr.v12i1.204>
- Lestari, M., & Prabowo, A. (2021). Building communication capacity in public administration through English language training. *Journal of Language and Public Policy*, 4(3), 201–215. <https://doi.org/10.21776/jlpp.v4i3.201>
- Maulana, R., & Siregar, F. (2022). English language proficiency and its effect on foreign investment facilitation in Indonesia. *Asian Journal of Public Administration and Policy*, 4(2), 98–111. <https://doi.org/10.36079/ajpap.v4i2.183>
- Pratama, I. G., & Dewi, S. M. (2021). Strengthening global communication skills for civil

- servants: Challenges and opportunities. *Journal of Governance and Public Policy*, 8(3), 210–223. <https://doi.org/10.18196/jgpp.v8i3.10336>
- Putri, E. A., & Kuncoro, B. (2022). English communication skills for better public service delivery: A study on Indonesian civil servants. *International Journal of Public Sector Performance Management*, 8(4), 295–310. <https://doi.org/10.1504/IJPSPM.2022.126843>
- Rahmah, A., & Yusuf, M. (2022). Improving English language training for civil servants: A case study in Indonesia. *Asian Journal of Public Administration and Policy*, 4(2), 134–147. <https://doi.org/10.36079/ajpap.v4i2.187>
- Saputra, H., & Wijaya, P. (2023). Global competence development in Indonesian bureaucracy through English training. *Journal of Public Sector Innovations*, 9(1), 54–68. <https://doi.org/10.22146/jpsi.v9i1.1278>
- Sari, K., & Abdullah, R. (2021). Barriers to English proficiency among local government officials in Indonesia. *Journal of Southeast Asian Public Administration*, 15(2), 177–190. <https://doi.org/10.21315/jsapa2021.15.2.9>
- Utami, D., & Hasanah, N. (2022). The role of English proficiency in strengthening international cooperation in public administration. *Journal of International Public Affairs*, 7(1), 41–55. <https://doi.org/10.1080/jipa.2022.1154>
- Wijayanti, R., & Handoko, L. (2023). English proficiency as a strategic competence for effective public service delivery. *International Journal of Public Sector Performance Management*, 9(4), 321–335. <https://doi.org/10.1504/IJPSPM.2023.128493>
- Yusuf, A., & Karim, S. (2021). Civil service reform and the urgency of English skills in ASEAN integration. *Journal of Asian Governance*, 3(2), 87–101. <https://doi.org/10.1080/jag.2021.3245>